

# PEMBANGUNAN PETERNAKAN: PENCAPAIAN DAN PROSPEK

## *LIVESTOCK PRODUCTION: ACHIEVEMENT AND PROSPECT*

Yusmichad Yusdja, Rosmijati Sayuti, Sri Wahyuning, Wahyuning K Sejati, Ikin Sodikin,  
Nyak Ilham dan Yulia F. Sinuraya

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

### ABSTRACT

Livestock production and development has been recognized as a reasonable power on the country's economic growth. Nevertheless, after the recovery of avian influenza break (AI) in 2003-2005, livestock production and development continuously face various problems. During 2006, the livestock sub-sector was unable to move from its appalling situation in the previous years. Population over extracting, feed and water shortage during the dry season, are the primary problems of livestock development. Such situation provides little hope of achievement in year 2007. The government is expected to alter such situation related to livestock development through the following steps: providing better service to livestock farmers in terms of developing livestock potential for the benefit of the people, providing and developing water supply system and feedstuff.

**Key words** : *livestock industry, livestock production, economic growth*

### ABSTRAK

Subsektor peternakan memperlihatkan perkembangan yang terus membuktikan dirinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Namun demikian, setelah mengalami *recovery* dari dampak krisis ekonomi 1997 dan wabah penyakit AI (Avian Influenza) tahun 2003-2005, subsektor peternakan terus mengalami banyak masalah yang dapat menghambat pertumbuhannya. Hasil dari tinjauan peternakan 2006 memperlihatkan bahwa permasalahan peternakan yang dihadapi belum bergeser dari keadaan sebelumnya. Masalah pengurusan ternak, kesulitan memperoleh pakan, dan kesulitan air pada musim kemarau, merupakan masalah utama yang belum terpecahkan. Dengan kondisi peternakan tahun 2006 tersebut maka tidak akan banyak kemajuan yang dapat dicapai tahun 2007. Saran kebijakan untuk jangka pendek adalah pemerintah memberikan pelayanan sebesar-besarnya dalam pengembangan sumberdaya ternak, penyediaan air, dan hijauan makanan ternak.

**Kata kunci** : *industri peternakan, produksi peternakan, pertumbuhan ekonomi*

### PENDAHULUAN

Industri peternakan kini memasuki era baru sebagai sumber pertumbuhan pertanian. Pembangunan industri peternakan dalam tiga tahun terakhir telah berhasil memberikan kontribusi PDB yang terus melonjak secara konsisten. Pertumbuhan PDB Peternakan pada tahun 2005 sebesar 7,9% melebihi tingkat pertumbuhan sektor pertanian (3,5%) dan pertumbuhan PDB nasional (5,5%). Pemerintah, untuk tahun 2007, telah menyetujui anggaran pembangunan peternakan sebesar Rp. 7,8 triliun melebihi anggaran untuk tanaman pangan dan perkebunan, sebagai komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan industri peternakan.

Pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pembangunan peternakan dengan tambahan yang semakin besar untuk mendapatkan populasi sapi sebanyak 16 juta ekor pada tahun 2010. Namun demikian, peningkatan anggaran pembangunan peternakan tidak akan banyak berguna jika tidak disertai dengan kemampuan menentukan arah pembangunan peternakan, kebijakan yang diperlukan, dan merumuskan program yang efektif. Menjawab tantangan itu, perlu dilakukan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan peternakan di tingkat mikro.

Industri peternakan mengalami pemulihan pada tahun 2000 setelah dilanda krisis moneter tahun 1997. Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan subsektor peternakan modern khusus industri ayam ras dan usaha

penggemukan sapi potong mengalami penurunan produksi yang tajam. Kedua industri modern ini, ternyata mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap impor bibit dan bahan baku pakan. Sementara usaha peternakan domestik yang seharusnya mempunyai keunggulan komparatif ternyata tidak dapat meraih keuntungan dari situasi krisis tersebut, kecuali usaha sapi perah. Usaha sapi perah dapat menikmati kenaikan nilai tukar dolar yang terjadi tersebut karena peningkatan daya saing susu segar domestik.

Industri ayam ras ternyata dapat memulihkan diri pada tahun 2003, namun pada akhir tahun itu juga industri ayam ras kembali menghadapi krisis baru, yakni wabah AI (Avian Influenza). Wabah AI dapat menular dan menimbulkan kematian yang tinggi pada manusia maupun unggas, sehingga masyarakat secara psikologis merasa sangat khawaaatir. Pandemi AI, dalam waktu singkat telah menyebabkan produksi ayam ras nasional turun 70% dan perusahaan peternakan (khususnya di Jabar) sebanyak 60% harus menutup usahanya. Industri peternakan ayam ras mengalami pemulihan pada tahun 2000, walau sampai saat ini, wabah AI masih terus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dan pada tahun 2006 ini wabah telah mencapai 30 provinsi di Indonesia. Wabah AI, masih tetap merupakan ancaman bagi industri ayam ras dan babi.

Keragaan industri peternakan pada tahun 2006, tidak lain merupakan vektor atau refleksi dari dua peristiwa besar tersebut dan berbagai peristiwa sebelumnya. Selain itu, menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan perkembangan komoditas tradisional, yakni ternak lokal? Berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar populasi ternak lokal mengalami pengurangan yang terus menerus, sehingga pertumbuhan populasi minus dibandingkan jumlah kelahiran atau penambahan. Akibat pengurangan tersebut, beberapa jenis ternak seperti sapi potong, kambing, kerbau, dan ayam buras akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk pemulihan kembali.

Tujuan penulisan makalah ini adalah pertama, melakukan tinjauan dan analisis perkembangan industri peternakan yang telah dicapai pada tahun 2006 mencakup sumberdaya ternak, sumberdaya alam yang terkait, manajemen dan teknologi, serta kebijakan dan program

pemerintah. Tujuan kedua adalah mencoba membuat suatu pandangan atau estimasi tahun 2007 berdasarkan keadaan sekarang dengan fokus pada *supply-demand*, harga-harga, serta dampak kebijakan dan program. Penulisan review dan *outlook* peternakan ini pada akhirnya mempunyai tujuan besar, yakni memberikan informasi dan pandangan-pandangan ke depan, sehingga kebijakan pada tingkat makro dapat menyentuh simpul-simpul pembangunan peternakan pada tingkat mikro. Selama ini, kebijakan makro tidak dapat mendorong pembangunan peternakan karena sistem peternakan domestik belum berjalan.

## REVIEW ANALISIS DAN KINERJA PETERNAKAN 2006

Situasi peternakan masa kini merupakan refleksi tahun-tahun sebelumnya. Apa yang terjadi pada tahun 2006 merupakan vektor dari berbagai dampak kebijakan, program, perubahan lingkungan, dan perekonomian masa lalu. Hal tersebut, diperlihatkan dengan jelas dalam review berikut.

### PDB, Kesempatan Kerja, dan Konsumsi *PDB Peternakan*

Pertumbuhan PDB subsektor peternakan selama 15 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Tabel 1 memperlihatkan perkembangan PDB sektor pertanian dan subsektor peternakan 1993-2007. Pada kondisi puncak sebelum tahun 1997, pertumbuhan PDB subsektor peternakan lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 2000, industri peternakan modern mengalami kebangkrutan. Krisis ekonomi membuktikan bahwa pertumbuhan tinggi belum tentu menjamin pertumbuhan yang stabil, khusus jika industri tidak mandiri dalam mengadakan kebutuhannya. Industri peternakan modern seperti perusahaan sapi *feedlot* dan ayam ras mengalami kolaps karena mempunyai ketergantungan yang relatif tinggi terhadap bahan baku dan teknologi input dari impor. Sampai saat ini, Indonesia secara rutin mengimpor bibit ayam ras, sapi bakalan, beberapa jenis bahan baku pakan, *feed suplement* dan antibiotika, karena kesulitan atau belum mampu memproduksi dalam negeri.

Tabel. 1. Perkembangan PDB Sektor Petanian dan Subsektor Peternakan

Tahun	PDB Peternakan Akhir Periode	% Pertumbuhan PDB			% PDB Peternakan Thd	
		Peternakan	Pertanian	Nasional	Pertanian	Nasional
1993-1997	11.688	6,56	4,27	6,94	11,6	1,72
1997-1999	23.761	-1,98	-0,06	-6,7	10,5	1,8
2000-2004	40.600	4,98	3,55	4,45	12,71	1,94
2004-2006	48.233	7,92	na	na	na	na
2006-2007	52.230	8,32	na	na	na	na

Sumber: Statistik Peternakan 2006

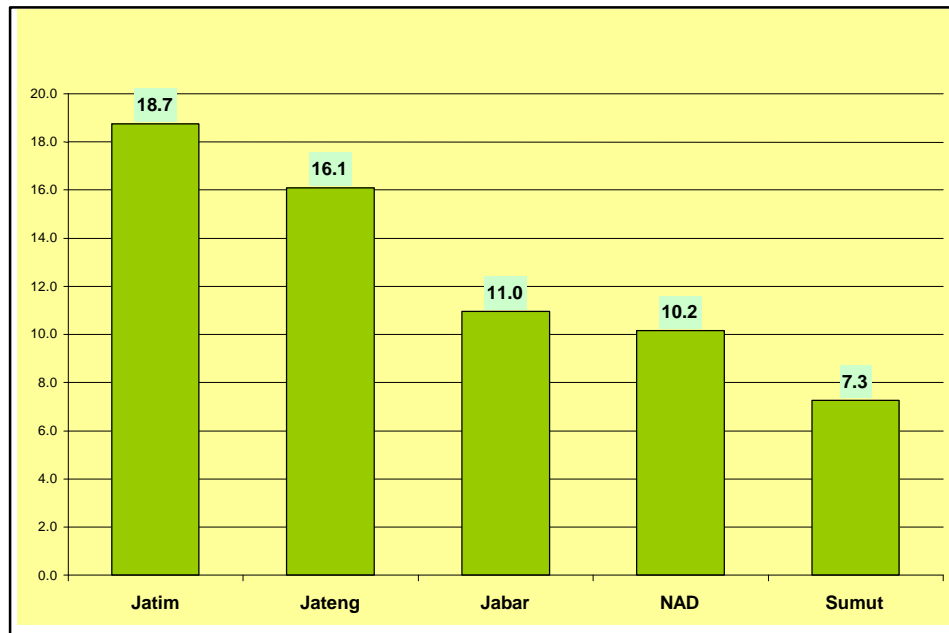
Catatan: Data Tahun 2006 merupakan angka proyeksi

Tahun 2000, industri ayam ras dan *feed-lotter* telah pulih kembali. Hal ini diperlihatkan oleh pencapaian tingkat produksi yang mulai meningkat dan tingkat pertumbuhan yang menyamai keadaan sebelum krisis wabah AI. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, PDB subsektor peternakan akan mempunyai potensi masa depan yang mampu memicu pertumbuhan PDB sektor pertanian. Untuk tahun 2006-2007 pertumbuhan diramalkan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, karena dampak AI ternyata tidak mempengaruhi konsumsi dan produksi pada tingkat nasional.

Adalah sangat penting menentukan provinsi mana yang memberikan sumbangan PDB terbesar untuk sumber pengetahuan dalam mem-

buat kebijakan pengalokasian dana pembangunan peternakan. Gambar 1 memperlihatkan, lima provinsi terbesar sebagai penyumbang PDRB adalah Jatim, Jateng, Jabar, NAD dan Sumut dengan total kontribusi sebesar 63%. Provinsi Jatim dan Jateng merupakan wilayah sentra produksi daging, telur, dan susu dengan struktur agribisnis berbentuk usaha rakyat. Berbeda dengan Jabar sebagai sentra produksi daging broiler dan sapi potong yang sebagian besar dihasilkan oleh agribisnis usaha swasta. Pada sisi lain, Jabar dan DKI Jakarta merupakan wilayah sentra konsumsi terbesar yang selalu mengalami kekurangan.

NAD dan Sumut merupakan dua provinsi di Sumatera sebagai penghasil daging dan telur terbesar, namun beberapa tahun terakhir peran



Sumber: Statistik Peternakan 2006

Gambar 1. Lima Besar Penqhasil PDRB Peternakan di Indonesia, 2000-2005

NAD semakin menurun, sementara Sumut sebagai sentra konsumsi tersebar di Sumatera selalu menjadi sasaran empuk bagi impor daging dan telur secara ilegal dari Malaysia dan Singapura. Bali, NTB, dan NTT merupakan pemasok terbesar sapi potong ke pusat konsumsi utama, yakni Jabar dan DKI Jakarta, memberikan sumbangan PDRB yang relatif besar bagi provinsi masing-masing, tetapi tidak mempunyai peran yang signifikan bagi sumbangan terhadap PDB. Kebijakan makro terutama kebutuhan anggaran pembangunan dan investasi memang tidak banyak menyentuh ketiga provinsi penting ini.

### **Kesempatan Kerja Subsektor Peternakan**

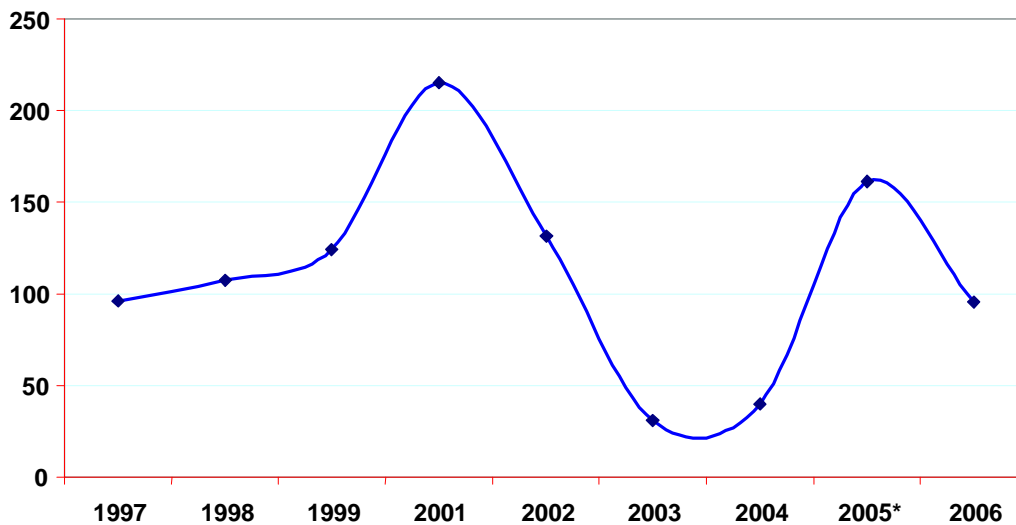
Peranan subsektor peternakan dalam penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah rumah tangga peternak (RTP). Selama 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan RTP yang relatif kecil dari 5,62 juta pada 1993 menjadi 5,63 juta pada tahun 2003. Sensus Pertanian (1983 dan 1993) menunjukkan bahwa usaha sapi potong melibatkan paling banyak RTP yaitu 2,95 juta, sedangkan ternak ayam ras melibatkan RTP yang relatif kecil. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa sebesar 80% produksi sapi potong merupakan usaha rakyat, dan sebaliknya 80% produksi ayam broiler merupakan usaha komersil padat modal dengan skala usaha lebih dari 500 ribu ekor. Sedangkan tingkat produksi daging ayam broiler dua kali lebih besar dibandingkan

produksi daging sapi. Jelas sekali keadaan ini menggambarkan bahwa industri ayam ras bukan lagi merupakan kesempatan berusaha bagi masyarakat banyak.

### **Investasi dan Mutu Pelayanan yang Rendah**

Bahan diskusi berikut diambil dari Yusdja dan Ilham (2006). Peran investasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan agribisnis peternakan dan investasi publik. Investasi mendorong pertumbuhan usaha peternakan dan menimbulkan efek multiplier yang luas. Sumber investasi bagi pembangunan peternakan selama ini berasal dari dana pemerintah, PMDN, dan PMA. Namun, sejak masa reformasi dan kesulitan dana pembangunan, kegiatan pemerintah banyak difokuskan pada usaha memberikan pelayanan. Gambar 2 memperlihatkan perkembangan investasi dalam subsektor peternakan (PMDN, 2006). Investasi tertinggi dicapai tahun 2001 sebesar Rp 200 milyar lebih, namun kemudian terus menurun sampai tahun 2004, naik rendah pada tahun 2005, dan kemudian turun kembali pada tahun 2006. Berdasarkan jumlah investasi yang relatif kecil tersebut dibandingkan kebutuhan, dan juga berdasarkan bentuk fluktuasi kurva investasi yang cenderung menurun, memperlihatkan tiada gejala investasi subsektor peternakan akan berkelanjutan.

Jika dilihat lebih jauh ternyata investasi PMA yang terjadi dalam 5 tahun terakhir hanya



Gambar 2. Perkembangan Investasi Peternakan 1997-2006 (Rp Milyar)

10% dari total investasi peternakan. Jika investasi peternakan dibandingkan dengan investasi pertanian, hanya sekitar 9%. Kesimpulan yang diambil dari perkembangan investasi tersebut adalah bahwa usaha peternakan dalam negeri tidak mempunyai daya saing yang tinggi sehingga tidak menarik para investor dalam menanamkan modalnya. Bahkan dalam sektor pertanian sendiri usaha peternakan belum mempunyai posisi yang dapat diandalkan.

Perkembangan kemajuan investasi yang relatif tidak menggembirakan di atas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan daya saing industri peternakan terutama ternak domestik. Peningkatan daya saing antara lain melalui usaha-usaha peningkatan kemampuan ternak induk melalui rekayasa genetika pada tingkat ternak sumberdaya, penyediaan lahan dan air untuk penanaman hijauan dan butir-butiran yang dibutuhkan ternak, serta meningkatkan pengendalian penyakit yang banyak menimbulkan angka kematian pada hewan, sehingga resiko ekonomi usahaternak dapat dikurangi (Wodzicka, 1993). Saran-saran tersebut seharusnya sesuai dengan rencana *roadmap* peternakan yang diinginkan.

### **Perkembangan Konsumsi Produk Ternak**

Krisis ekonomi memberikan dampak penurunan daya beli masyarakat sehingga terjadi penurunan tren konsumsi daging dan telur. Pada periode setelah krisis, laju pertumbuhan konsumsi daging dan telur meningkat kembali, bahkan melampaui kondisi sebelum krisis. Demikian juga dengan konsumsi absolut, tahun 1999 merupakan saat konsumsi daging menurun mencapai titik terendah, dan tahun 1998 merupakan saat konsumsi telur menurun, namun kemudian meningkat kembali hingga tahun 2005. Secara umum pemulihan konsumsi produk ternak relatif cepat karena didukung oleh industri perunggasan nasional dan struktur perusahaan, dalam bentuk usaha komersil yang responsif terhadap perubahan-perubahan.

Jika dirinci menurut jenis daging, penduduk Indonesia lebih banyak mengkonsumsi daging ayam broiler dan sapi. Kebutuhan konsumsi daging sekitar 5% dipenuhi dari produk impor dan 25% berasal dari impor sapi bakalan. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang stabil, kecenderungan impor semakin meningkat. Peningkatan impor tersebut dapat disebabkan permintaan daging berkualitas (*prime cut*) dan daging kelas

standar yang relatif lebih murah dibanding produk domestik. Gambaran ini memperlihatkan bahwa tren permintaan terhadap produk peternakan ke depan semakin meningkat, khususnya daging dan telur ayam. Pada masa depan sudah patut diperhatikan upaya peningkatan kualitas sesuai yang diinginkan konsumen.

Selama ini, pengadaan susu untuk dikonsumsi sebagian besar masih dipasok dari produk impor. Namun pada kondisi krisis ekonomi, harga susu domestik jauh lebih murah dari harga susu impor, sehingga walaupun tanpa kewajiban menyerap produksi susu segar domestik, peningkatan daya saing produk susu domestik saat itu menyebabkan industri pengolahan susu nasional menyerap sebagian besar pasokan domestik. Fenomena ini memberikan informasi bahwa jika harga produk susu domestik memiliki daya saing, secara kualitas sudah mampu diandalkan sebagai bahan baku industri susu nasional. Bahkan pada masa krisis hingga sekarang Indonesia sudah melakukan ekspor produk susu olahan.

Sebelum krisis ekonomi, penyediaan susu per tahun untuk konsumsi sebesar 968,8 ton meningkat menjadi 1043,3 pada masa krisis dan meningkat lagi setelah masa krisis yaitu 1377,8. Hal ini memperlihatkan bahwa laju peningkatan penyediaan susu sudah sulit ditingkatkan, karena (a) dari sisi suplai, produktivitas peternakan sapi perah rakyat sudah stagnan dan (b) permintaan domestik yang semakin jenuh akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun demikian, masalah permintaan domestik yang menurun dapat diatasi dengan melakukan ekspor produk susu olahan. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan produktivitas usaha sapi perah domestik.

### **Perkembangan Agribisnis Peternakan**

#### **a. Ternak Ruminansia Besar Penghasil Daging**

Ternak ruminansia besar utama terdiri atas sapi, kerbau, dan kuda. Kelompok ternak ini berbadan besar, dapat mencapai 600-1000 kg berat hidup. Mulai melahirkan umur 2 tahun dan jumlah anak pada umumnya satu ekor per tahun. Karena ciri-cirinya itu, ternak ini membutuhkan pakan yang relatif tinggi, mempunyai pertumbuhan populasi yang relatif lambat dan produksi daging relatif tinggi (Singh and Moore,

1972). Sapi mempunyai peran terbesar dalam perekonomian dibandingkan komoditas ruminansia lain, karena jumlah populasi sapi mencapai 80% dari total ruminansia, dan tersebar hampir di seluruh provinsi.

Terdapat berbagai jenis sapi, yang utama adalah sapi Bali (termasuk sapi Madura) dan sapi Onggol. Sapi Bali banyak berperan dalam perekonomian dengan jumlah populasi 6 juta atau 60% dari jumlah sapi. Sapi Bali mempunyai daya hidup tinggi, tahan penyakit, dan pengembalaan yang buruk, mempunyai perdagangan yang baik dan digemari konsumen. Sebaran sapi Bali sekitar 61% terdapat di Jatim, Jateng, Sulsel, Bali, NTT, dan NTB. Keenam wilayah ini sekaligus merupakan wilayah penghasil utama bagi kebutuhan wilayah konsumsi khususnya DKI dan Jabar.

Sebagian besar ternak sapi dipelihara secara tradisional dalam bentuk usaha rakyat. Ada tiga sistem pemeliharaan yang umum dilakukan yakni:

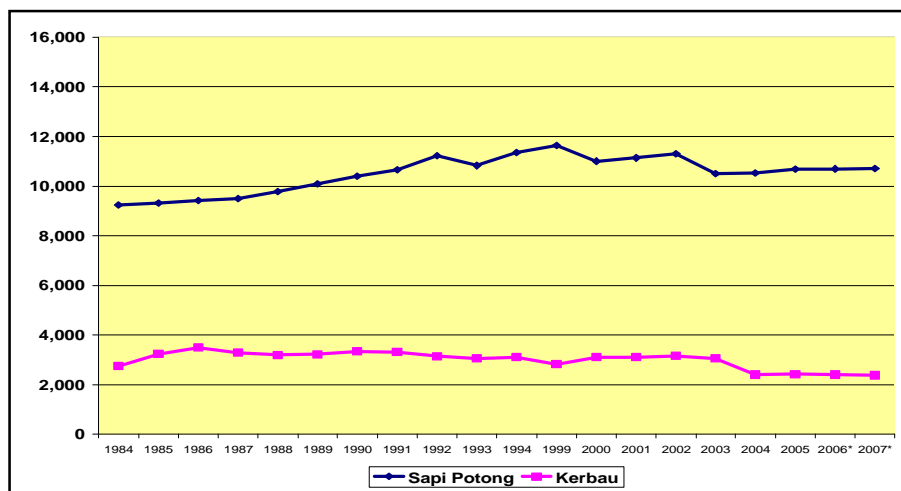
1. Sistem penggembalaan ternak (NTT, NTB, Bali, Kalsel, Sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan) sekitar 15% dari populasi. Pada sistem ini, pemeliharaan ternak tidak mempunyai tujuan yang jelas, selain untuk status sosial dan tabungan. Karena itu, keberhasilan pengembangan pada wilayah ini sangat tergantung pada pengelolaan padang penggembalaan itu.
2. Sistem tidak digembalakan, *cut and carry* (Jatim dan Jateng, sebagian Sulawesi), men-

cakup sekitar 52% dari total populasi. Pada sistem ini pengembangan peternakan sangat tergantung pada ketersediaan tenaga kerja keluarga yang setiap harinya berkeliling mencari HMT. Karena itu, pengembangan ternak dengan menyediakan HMT akan mengurangi tenaga kerja keluarga, dan karena itu skala usaha bisa meningkat. Tujuan produksi adalah tenaga kerja, dan peternak tidak begitu peduli dengan sistem pasar dan produksi.

3. Sistem kombinasi, ternak digembalakan pada areal terbatas dan kekurangan HMT diberikan di kandang. Sistem ini mencakup 23 % dari populasi dan menyebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar usaha penggemukan berada dalam sistem ini. Sistem ini bertujuan untuk produksi daging, susu, dan sapi bakalan.

Kebijakan pengembangan ternak sapi harus dilihat berdasarkan ketiga sistem tersebut, karena terdapat perbedaan masalah yang dihadapi, dan karena itu penanganannya juga berbeda (Yusdja dan Ilham, 2006).

Sistem pemasaran dan tata niaga yang ada tidak memberikan insentif yang layak kepada peternak, apalagi para peternak tidak mempunyai daya tawar. Peran pedagang sangat dominan dalam menentukan harga. Pada sisi lain, perdagangan antarpulau dan wilayah dalam bentuk ternak hidup membutuhkan biaya angkut dan risiko usaha yang lebih besar. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena perdagangan karkas menggantikan ternak hidup, khususnya ternak rumi-



Sumber: Statistik Peternakan, 2006.

Gambar 3. Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kerbau 1994-2007 di Indonesia

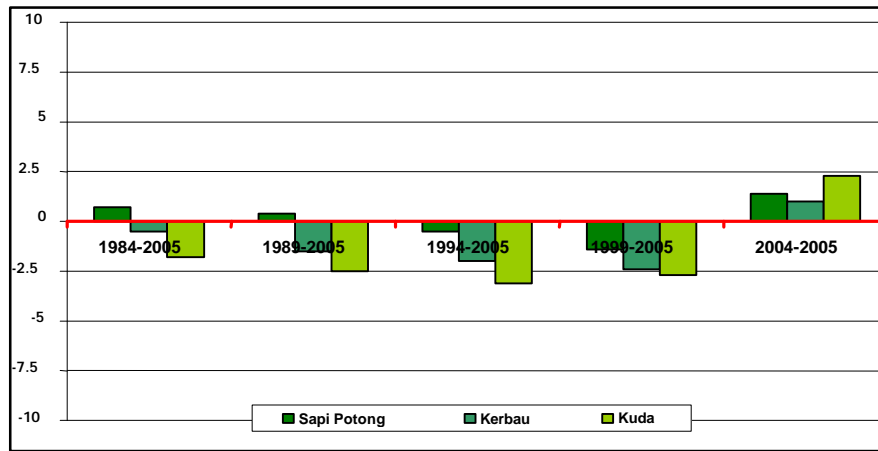
nansia belum layak dilakukan, karena infrastruktur yang tersedia belum memungkinkan. Gambar 3 memperlihatkan pola pertumbuhan sapi potong dan kerbau, dua komoditas utama penghasil daging merah. Pertumbuhan sapi relatif landai dan hampir konstan sedangkan kerbau terus tumbuh menurun.

Gambar (4) memperlihatkan tingkat pertumbuhan populasi ruminansia besar dari tahun 1984 sampai tahun 2005. Tingkat pertumbuhan tersebut dihitung berdasarkan priode awal 1984, 1989, 1994 dan 1999 terhadap tahun 2005. Teknik perhitungan pertumbuhan dengan metode ini untuk mendapatkan angka proyeksi tahun 2006 dan 2007, dan dapat memperlihatkan

perubahan yang terjadi di antara tahun 1984 dan 2005.

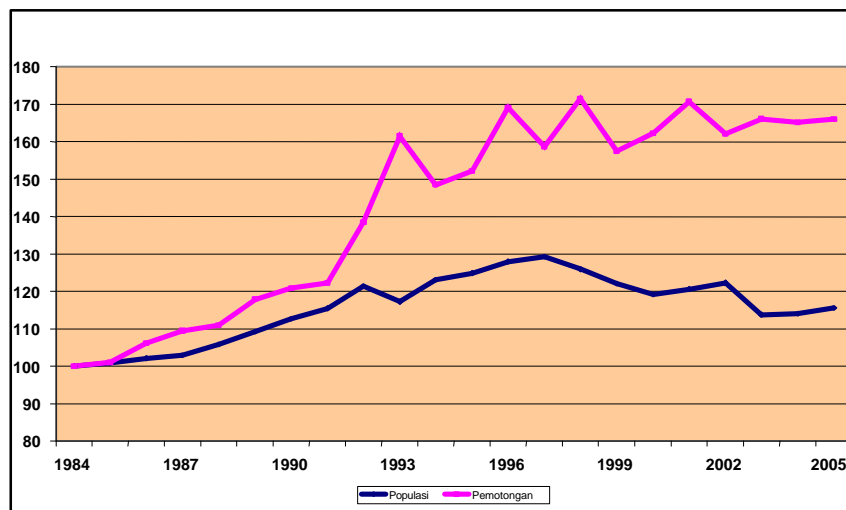
Pada priode pertumbuhan 1984-2005 memperlihatkan pertumbuhan sapi potong yang relatif yakni kurang dari 1%, sedang kerbau dan kuda mengalami pertumbuhan minus. Pada priode 1994-2005 dan priode 1999-2005, sapi, kerbau, dan kuda mengalami pertumbuhan minus. Kemudian antara tahun 2004-2005 terjadi pertumbuhan positif bagi ketiga komoditas dengan besar kurang dari 2,5%. Sementara pertumbuhan yang diharapkan adalah 15%/th.

Gambar (5) memperlihatkan indeks pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pemotongan



Sumber: Statistik Peternakan, 2006

Gambar 4. Pertumbuhan Ternak Ruminansia Besar 1984-2005



Sumber: Statistik Peternakan, 2006

Gambar 5. Perkembangan Indeks Populasi dan Pemotongan Sapi, 1984-2005

ngan sapi dari tahun 1984-2005. Indeks pertumbuhan populasi mempunyai penambahan yang relatif lambat dibandingkan indeks pemotongan yang terus melaju tajam.

Keadaan ini mendorong pengurusan sapi lokal. Jika perkembangan ini berlangsung terus tanpa ada kebijakan atau program yang dapat mengubah situasi, akan terjadi nilai indeks populasi akan mendekati angka 100.

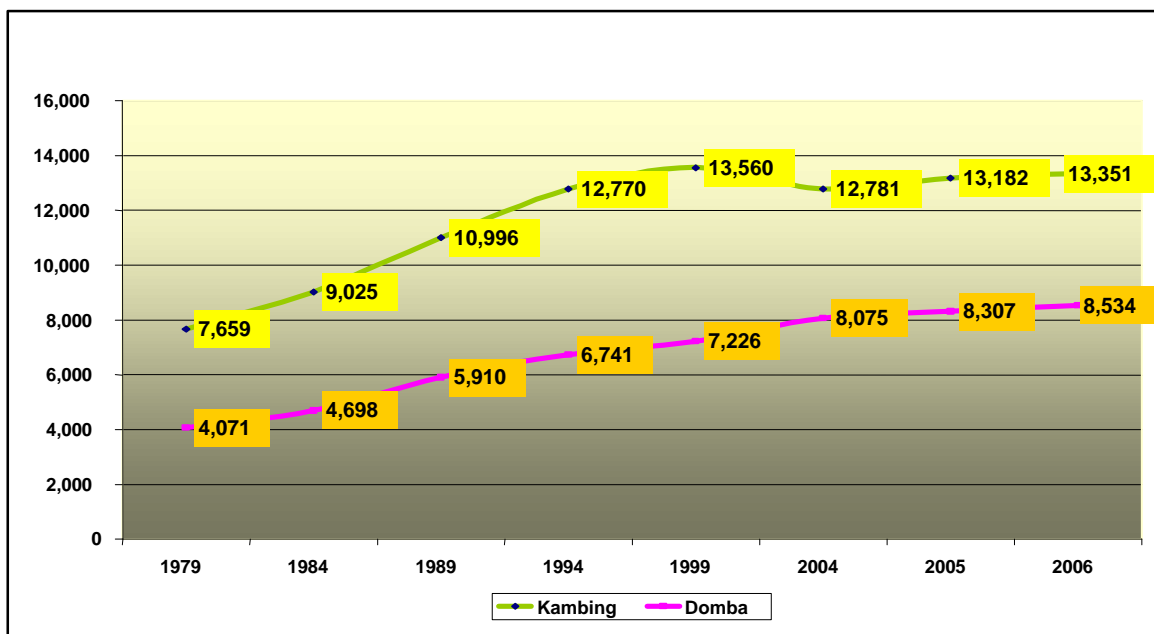
### b. Ternak Ruminansi Kecil

Kelompok ternak ruminansi kecil utama adalah kambing dan domba atau disebut kado. Ternak kado berukuran 10 kali lebih kecil dibandingkan sapi dan kebutuhan HMT juga kecil, sehingga ternak ini mempunyai banyak penggemar di pedesaan, terutama pada wilayah lahan kering. Pada lahan kering tersedia banyak HMT yang sesuai dengan selera ternak kambing dan domba. Sebagian besar ternak kambing dan domba diusahakan sebagai usaha rakyat (Wodzicka *et al.*, 1993). Gambar 6 memperlihatkan jumlah kambing dan domba di Indonesia

Secara umum, Indonesia sampai saat ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan sampai saat ini belum ada investor

berminat mengimpor kambing dan domba. Sebagaimana diketahui, Australia merupakan negara terbesar dalam mengekspor kambing dan domba ke berbagai negara Arab dan Asia, rata-rata 5 juta ekor per tahun sama besar dengan populasi domba di Indonesia. Indonesia tidak mengimpor kambing dan domba, walaupun terdapat gejala pengurusan kambing dan domba di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa provinsi seperti Jatim dan Jabar populasi kado mengalami pengurusan dalam 10 tahun terakhir. Indikator lain dapat dilihat dari perkembangan harga kambing dan domba yang terus meningkat dengan tingkat relatif tinggi yakni 40%/tahun, merupakan indikasi ada kelangkaan ternak kado.

Perusahaan swasta usaha ternak kambing dan domba sulit berkembang, karena penyebaran dan penetrasi usaha rakyat sedemikian rupa sehingga mempersempit pasar bagi usaha swasta. Pengembangan peternakan kado komersil skala swasta hanya mungkin jika pasar ekspor terbuka. Konsekuensinya jelas, yakni usaha skala besar dan tersedia padang penggembalaan serta manajemen dan iptek yang maju. Selama ini, para investor kurang berminat mengusahakan ternak kambing dan domba karena tidak memahami bisnis ini, risiko usaha relatif



Sumber: Statistik Peternakan, 2006

Gambar 6. Perkembangan Populasi Ruminansi Kecil, 1984-2006

tinggi, ternak kado lokal kurang produktif dibandingkan kado Australia misalnya. Atas dasar itu, pemecahan masalah pengembangan agribisnis kado perlu ditekankan pada pengembangan usaha rakyat melalui strategi dan program-program yang efektif.

### **c. Ternak Unggas**

Kelompok ternak unggas yang banyak diusahakan adalah ayam buras, ayam ras, itik, dan puyuh. Perkembangan ayam ras di Indonesia dimulai sejak tahun 1976 telah mencapai pertumbuhan fantastis melalui program penanaman modal asing (PMA). Pengembangan yang luar biasa ini banyak didukung oleh pengembangan infrastruktur industri yang relatif lengkap mulai dari hulu sampai ke hilir. Sampai saat ini, ayam ras memberikan sumbangan produksi daging terbesar merebut posisi daging sapi. Namun demikian, pertumbuhan yang dicapai ayam ras tersebut pada umumnya rapuh karena ditunjang oleh impor yang besar. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997-2000, industri ayam ras di Indonesia mengalami kebangkrutan dan produksi turun hingga 80% (Yusdja *et al.*, 2005). Industri kembali bangkit dengan cepat pada tahun 2000. Dua tahun kemudian yakni tahun 2003 sampai pada saat ini, industri ayam ras kembali menghadapi masalah besar yakni epidemi penyakit AI.

Ancaman AI tidak saja datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Jika epidemi AI terjadi pula di negara-negara eksportir bibit GPS, maka kelangsungan hidup industri ayam ras dalam negeri terancam. Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan dan pengembangan ayam ras adalah terletak pada kebijakan ekonomi makro, pengendalian penyakit yang mencakup kerja sama internasional dan kerja sama dengan peternak, serta menegakkan azas kemandirian secara bertahap. Azas kemandirian dapat dimulai dari pengadaan pakan dalam negeri, sehingga dalam 10 tahun ke depan dapat diharapkan Indonesia telah mempunyai stok induk yang dapat memproduksi GPS.

Sementara itu, pertumbuhan ayam broiler dari tahun 2003 dan 2006 hanya 1,9% relatif sangat kecil dibandingkan pertumbuhan sebelum krisis antara 2002-2003 sebesar 18,2%/th. Wabah AI pada ayam broiler memang jauh lebih parah dibandingkan ayam petelur. Dari 4 sentra produksi ayam broiler yakni Jatim, Jabar, Sumut,

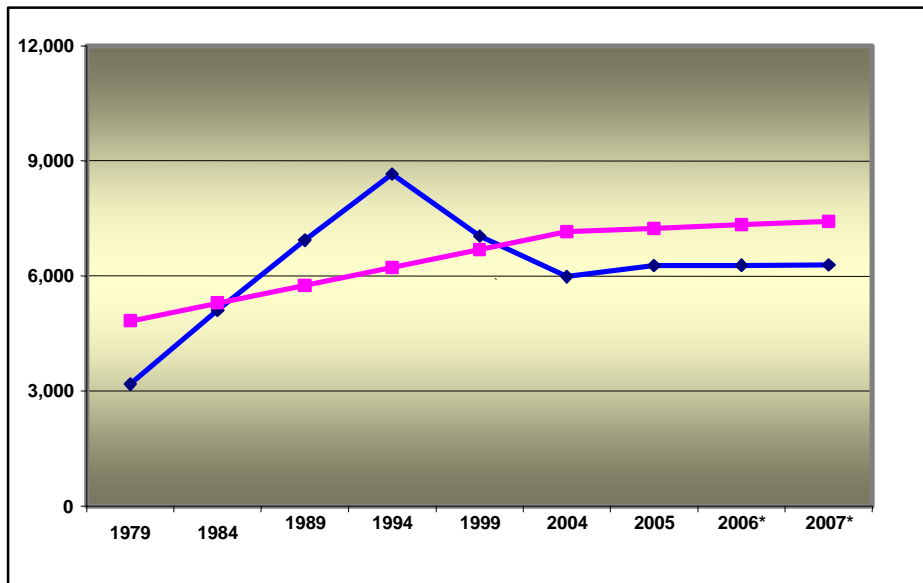
dan Jateng, hanya populasi ayam broiler yang mengalami pertumbuhan spektakuler yakni 86%, sedangkan dua provinsi sentra produksi yang lain hanya berkisar 2%.

Tahun 2006 ternyata memperlihatkan penurunan populasi broiler terjadi pada 10 provinsi terkena wabah antara 20 sampai 81%. Penurunan paling besar terjadi di Provinsi Jatim, Banten, Bali, Jateng, dan Sulsel yang mencapai jumlah 94 juta ekor. Kerugian AI tidak hanya terlihat dari angka kematian tetapi juga perlu diperhitungkan kegagalan karena hilangnya suatu harapan yang mestinya terjadi. Penurunan populasi ini terjadi karena dampak penurunan konsumsi broiler di berbagai daerah dan sebagian peternak broiler pindah ke ayam petelur, serta sebagian peternakan sektor 3 dan sebagian sektor 2 menutup usahanya khususnya di Kab. Bandung, Bogor, dan Tanggerang.

Ayam buras tidak umum diusahakan secara intensif, karena tidak menguntungkan. Kelemahan ayam buras ini adalah produksi telur relatif rendah, pertumbuhan lambat, dan angka kematian tinggi. Namun demikian, ayam buras mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit dan keadaan cuaca yang buruk, serta memungkinkan setiap orang dapat memeliharanya secara ekstensif dengan biaya hampir nol. Dengan pola dan sistem pemeliharaan ekstensif seperti itu, maka pertumbuhan populasi ayam buras relatif sangat lambat, apalagi jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ternak ayam buras diindikasikan mengalami pengurangan relatif besar sekitar 15%/th, bahkan di beberapa pusat konsumsi, pengurangan itu mencapai titik parah.

### **d. Ternak Babi**

Ternak babi merupakan kelompok ternak pemakan butir-butiran dan hijauan, termasuk hewan prolific karena itu cepat sekali berkembang. Ternak ini secara komersil banyak diusahakan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lain. Sangat disayangkan data statistik babi tidak membedakan jenis babi lokal dan babi hibrid. Salah satu pembatas pengembangan usaha ternak babi adalah pasar konsumsi yang sempit, karena sebagian penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga wilayah-wilayah pengembangannya juga sangat terbatas. Babi lokal dapat hidup lebih baik pada wilayah-wilayah non-



Sumber: Statistik Peternakan, 2006  
Keterangan: Garis Gelap: Populasi. Garis Terang: Proyeksi

Gambar 7. Perkembangan dan Proyeksi Populasi Babi, 1994-2006

muslim. Perkembangan populasi babi diperlihatkan dalam Gambar 7.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi daging babi dalam negeri tidak banyak bermasalah, bahkan mencapai titik jenuh. Salah satu indikasi adalah harga daging babi yang tidak banyak bergerak dari tahun ke tahun. Namun demikian, Indonesia memiliki wilayah luas yang sesuai bagi pengembangan ternak dalam bentuk usaha komersil skala menengah dan besar, terutama untuk ekspor. Indonesia mempunyai peluang besar untuk memenuhi ekspor, apalagi hubungan perdagangan internasional telah dibina. Salah satu strategi merebut pasar adalah membangun peternakan babi pada kawasan khusus, bekerja sama dengan para pedagang babi di Singapura. Kerja sama dalam bentuk kemitraan telah banyak dilakukan di Sumatera Utara. Kerja sama produksi dan perdagangan ini layak dilakukan, dibandingkan memproduksi sendiri, karena pasar yang tertutup.

### **Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu**

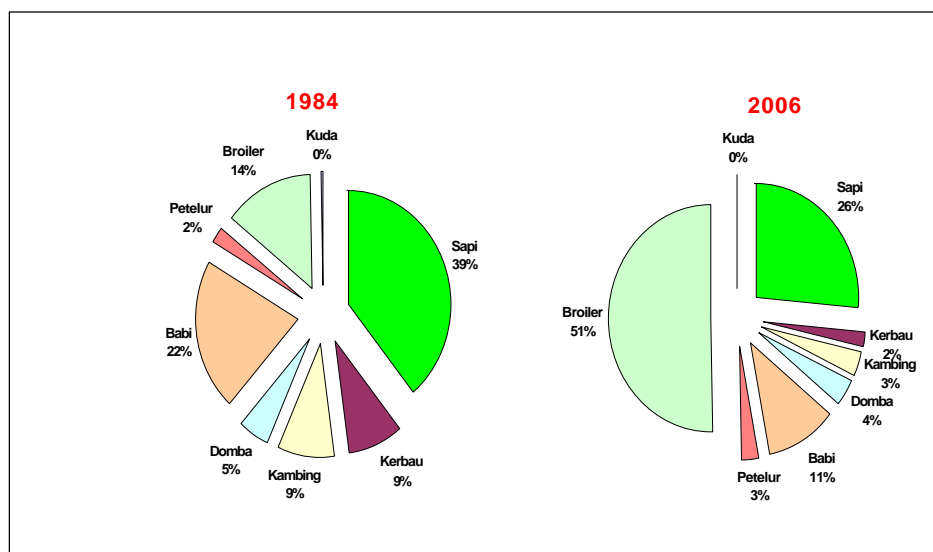
#### **a. Produksi Daging**

Total produksi daging tahun 1984 adalah 553 ribu ton, meningkat menjadi 893 ribu ton pada tahun 1999, dan terus meningkat secara

konsisten menjadi 1764 ribu ton tahun 2005. Indonesia mempunyai 8 jenis komoditas yang memberikan banyak peran dalam menyumbangkan konsumsi daging, yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam petelur, dan ayam broiler. Produksi daging ini tidak termasuk ayam buras dan itik, karena data tidak jelas bagaimana menghitungnya dan jumlahnya relatif besar, padahal populasi diduga terus menurun. Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2005 dibandingkan 1984 dan 1999 adalah 10,4 dan 16,2%.

Tabel 2 memperlihatkan produksi daging menurut sumber ternak. Tahun 1984, sekitar 80% dari produksi daging total merupakan sumbangan ternak sapi (29,2%), ayam buras (24,1%), babi (16%), dan broiler (10,6%). Pada tahun 2005, keempat komoditas utama penghasil daging tetap merupakan penyumbang besar tetapi telah terjadi perubahan posisi, yakni broiler (41,8%), sapi (21,9%), buras (14,7%), dan babi (9,4%) (Gambar 8). Ternyata sumbangan produksi lebih besar dari sisi ternak modern, sedangkan ternak tradisional terus menurun. Ini sangat memprihatinkan, karena proses produksi ternak modern sangat tergantung pada impor.

Dari ke 8 komoditas tersebut selama 1984-2005, 6 komoditas di antaranya terus mengalami penurunan kontribusi. Hanya 2 komoditas yang memberikan peningkatan kontribusi yakni broiler dan petelur. Segera dapat dilihat



Sumber: Statistik Peternakan, 2006

Gambar 8. %tase Kontribusi Daging Menurut Sumber Ternak, 1984 dan 2006

Tabel 2. Produksi Daging (000 ton) Menurut Komoditas Ternak (1984-2005)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda	Petelur	Broiler	Total
1984	216,4	48,2	48,3	28,8	119,1	1,7	12,2	78,5	553,2
1989	252,8	43,1	62,9	32,2	136,3	1,4	16,7	210,4	755,8
1994	336,5	48,2	57,1	42,6	183,6	2,3	22,6	498,5	1191,4
1999	308,8	48,1	45	32,3	136,8	2,3	25,7	294,5	893,5
2004	447,6	40,2	57,1	66,1	194,7	1,6	48,4	846,1	1701,8
2005	463,8	40,8	58,9	66,5	198,2	1,7	51,2	883,4	1764,5
r 1984 dan 2005	5,4	(0,7)	1,0	6,2	3,2	-	15,2	48,8	10,4
r 1999 dan 2005	8,4	(2,5)	5,1	17,6	7,5	(4,3)	16,5	33,3	16,2

Sumber: Statistik Peternakan, 2006

bahwa penerapan manajemen dan teknologi bibit, serta pakan yang maju telah mengangkat kedua komoditas ini. Sementara 6 komoditas lain merupakan usaha secara tradisional, teknologi rendah, serta pemberian pakan yang tidak bermutu dan tidak terorganisir. Berdasarkan nilai indeks pertumbuhan terlihat jelas nilai indeks yang terus menurun, sedangkan produksi total mengalami pertumbuhan 8,8% memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pertumbuhan.

Dampak manajemen dan teknologi yang rendah telah menyebabkan tingkat pengurusan yang relatif tinggi pada komoditas ternak tradisional. Berdasarkan penelitian PSEKP telah terjadi pengurusan untuk ternak sapi, kerbau, kambing, dan ayam buras. Dikhawatirkan beberapa komoditas sampai pada titik ambang keseim-

bangun, dimana angka kelahiran tidak mungkin lagi menjamin konsumsi, maka dalam situasi semacam ini, akan mendorong kepunahan komoditas.

### b. Produksi Telur

Secara nasional populasi ayam petelur tahun 2005 dibandingkan 2003 naik dengan nyata sebesar 24,5%. Angka pertumbuhan ini relatif lebih besar dibandingkan pertumbuhan sebelum masa AI antara tahun 2001-2003 sebesar 6,4% per tahun. Hal ini jelas memperlihatkan, bahwa wabah AI tidak memberikan dampak berkepanjangan terhadap populasi dan usaha ayam petelur, justru kini meningkat tajam melampaui keadaan sebelum wabah AI. Pertanyaan pertama

mengapa dan di mana peningkatan populasi itu terjadi?

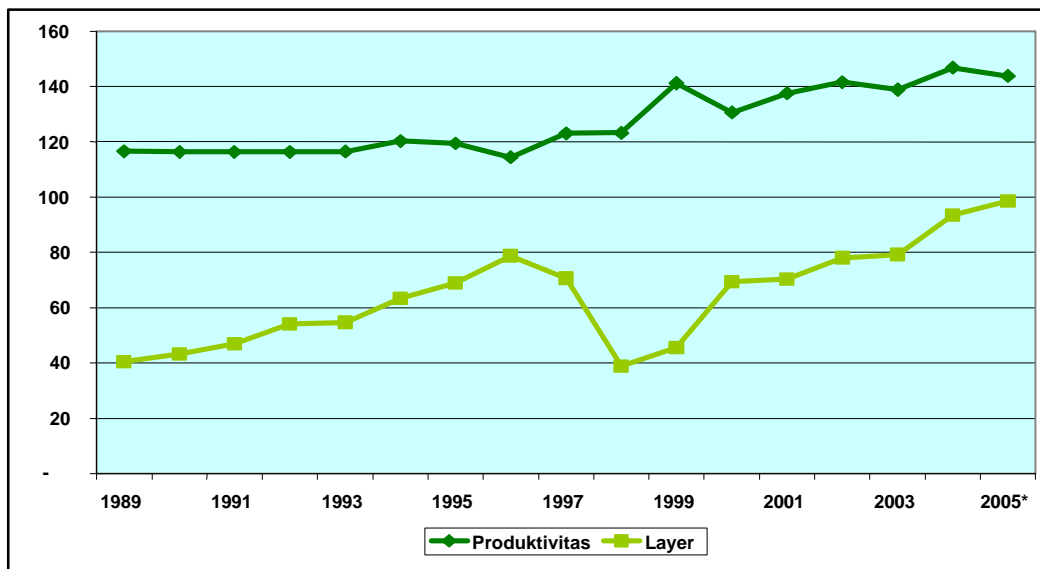
Di Indonesia, terdapat 5 wilayah provinsi sebagai sentra produksi penghasil telur dengan menyumbang sebesar 70% dari total populasi ayam ras petelur nasional. Kelima provinsi itu secara berurutan adalah Jatim, Sumut, Jabar, Jateng dan Banten. Kelima provinsi ini merupakan wilayah tertular AI berat pada tahun 2004. Data Statistik Peternakan memperlihatkan bahwa ke lima provinsi sentra populasi ayam ras petelur mengalami pertumbuhan populasi ayam petelur yang cukup spektakuler, yakni 30% antara tahun 2003 dan 2005. Pertumbuhan yang spektakuler ini telah menciptakan tambahan populasi ayam petelur sebesar 14 juta ekor. Pertumbuhan populasi ayam petelur terbesar terjadi di Jatim, dengan peningkatan sebesar 71,8% sehingga mendongkrak populasi hampir dua kali dibanding sebelum AI. Pertumbuhan populasi terbesar kedua terjadi di Jateng, dengan peningkatan sebesar 46,6%.

Data dan informasi di lapang memperlihatkan sebagian peternak pindah usaha dari ayam broiler menjadi ayam petelur. Pertimbangan mereka adalah bahwa produksi telur lebih aman dibandingkan menghasilkan daging broiler yang sarat dengan berita AI. Jika ada wabah AI, maka dampak pemberitaan terbesar adalah pada

konsumsi karkas bukan pada telur. Pada sisi lain, wabah AI lebih banyak menyerang ayam broiler. Kecenderungan perubahan usaha ini sangat nyata terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sebaliknya di provinsi Banten, yang merupakan wilayah pertama tertular AI pada tahun 2003, dan merupakan wilayah utama sebagai usaha komersil petelur ternyata tidak mampu memulihkan populasi seperti semula. Peternak skala besar ternyata enggan meningkatkan skala usaha karena masih cemas wabah AI. Aspek psikologis wabah AI di Banten memang cukup berat, apalagi wilayah ini pula untuk pertama wabah AI menyerang keluarga Iwan sehingga meninggal dunia awal Tahun 2005.

Selain itu, hal yang lain yang juga sangat penting menjadi perhatian adalah produktivitas ayam petelur tersebut. Gambar 9 memperlihatkan perkembangan produktivitas ayam petelur dari tahun 1999-2005. Perkembangan produktivitas ternyata lebih lambat dibandingkan pertumbuhan populasi ayam petelur. Hal ini dapat disebabkan berbagai hal antara lain mutu petelur yang memburuk, sistem *replacement stock* yang tidak seimbang, dan pemberian pakan yang tidak sesuai. Perbaikan produktivitas sangat dibutuhkan untuk masa mendatang dengan cara memperbaiki sistem manajemen ayam petelur.



Sumber: Statistik Peternakan, 2006

Gambar 9. Perkembangan Populasi dan Produktivitas Ayam Petelur, 1999-2005

## **Kesehatan Ternak dan Keamanan Makanan**

Dari sisi suplai pengamanan mutu produk akan menjamin keberlanjutan usaha. Tanpa adanya upaya menghasilkan mutu produk yang aman dapat meragukan konsumen, sehingga menyebabkan permintaan terhadap produk akan berkurang. Dari sisi konsumen, pengamanan produk peternakan berkaitan dengan ketahanan pangan. Seperti diketahui bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup berapa kuantitas bahan pangan yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pangan dan keamanan bahan pangan tersebut.

Lemahnya pengamanan mutu produk ternak berakibat merugikan pihak produsen dan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pengamanan mutu produk. Kebijakan tersebut mencakup menciptakan perangkat peraturan dan sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar, membangun jaringan lembaga yang mempunyai otoritas pengujian keamanan produk peternakan, melakukan pengujian secara berkala terhadap keamanan produk yang beredar di pasar, dan mensosialisasikan hasil pengujian secara berkala.

Gangguan keamanan produk dapat terjadi sejak proses produksi hingga dikonsumsi. Kesehatan ternak dan penggunaan obat-obatan/*feed supplement* tanpa prosedur yang standar saat kegiatan budidaya, dapat menyebabkan produk ternak mengandung bibit penyakit yang berasal dari infeksi dan keracunan mikroorganisme saat ternak masih hidup, dan mengandung residu yang berbahaya bagi kesehatan. Penanganan produk sejak di panen hingga dipasarkan dapat juga menyebabkan produk peternakan kurang aman untuk dikonsumsi. Karena produk peternakan sangat mudah terkontaminasi. Bahkan, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, banyak produk peternakan yang diperlakukan tidak wajar, seperti penggunaan formalin untuk pengawetan produk ternak. Ditingkat konsumen akhir, pengolahan produk yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan dapat menyebabkan keracunan.

Kondisi saat ini Indonesia telah memiliki banyak perangkat peraturan yang berkaitan dengan masalah pangan diantaranya adalah UU No 6 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut didukung oleh PP dan peraturan lain hingga ketingkat

program seperti adanya program ASUH (Aman-Sehat-Utuh-Halal) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan.

## **Dampak Ekonomi AI**

Wabah AI (*Avian Influenza*) atau flu burung telah mengalami masa 3 tahun di Indonesia dan belum terlihat tanda-tanda wabah ini akan berhenti. Fakta memperlihatkan bahwa daerah tertular wabah terus berkembang, sekalipun angka kematian atau pemusnahan akibat AI semakin berkurang, khususnya pada ayam ras. Pada sisi lain, penularan AI pada manusia di Indonesia semakin meluas dan telah mencapai kematian 44 orang dari 87 orang penderita. Hal ini menyebabkan isu AI tidak lagi pada industri perunggasan tetapi lebih kepada isu keselamatan manusia. Karena itu, berita AI menyerang manusia menimbulkan efek psikologis bagi seluruh bangsa dan dunia, sehingga memberikan dampak luas pada industri perunggasan, terutama penurunan konsumsi hasil unggas.

Wabah AI menyerang seluruh jenis unggas, terutama ayam ras dan buras. Wabah AI pada ayam ras telah menyebabkan kematian lebih dari 16 juta ekor dalam masa 2003 sampai awal 2005. Wabah AI telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi bangsa, khususnya industri perunggasan. Serangan wabah AI berat pada peternakan ayam ras terjadi pada periode tahun 2003 dan 2004, kemudian menurun pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 boleh dikatakan tidak ada lagi kasus, kecuali pada ayam buras. Data Statistik Peternakan memperlihatkan bahwa industri peternakan secara nasional telah mengalami *recovery* tahun 2006. Dengan demikian, tepat saatnya untuk melihat bagaimana dampak wabah AI terhadap ekonomi industri peternakan saat ini.

Dampak AI terhadap perekonomian AI secara nasional dapat dikatakan tidak ada sejak tahun 2005. Populasi ayam petelur terus meningkat bahkan tumbuh spektakuler. Sedangkan populasi broiler juga mengalami pertumbuhan sekalipun relatif lebih kecil dibandingkan tingkat pertumbuhan sebelum AI. Dengan demikian, peningkatan populasi secara otomatis disertai dengan peningkatan produksi telur juga meningkat. Dapat dikatakan, kegiatan perekonomian usaha ayam petelur telah berjalan kembali normal. Dampak AI secara nyata adalah pada penyusutan kesempatan kerja dan kesempatan

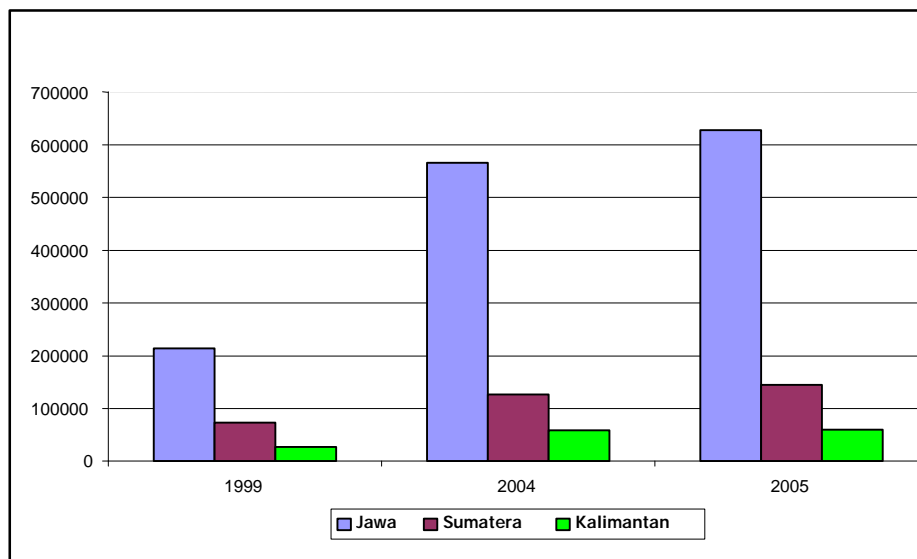
usaha dala berbagai bidang, mulai dari budi- daya, perdagangan, pengusaha PS, dan perusa- han rumah potong ayam.

Wabah AI, yang telah memberikan keru- gian yang besar bagi industri, telah mengarahkan perubahan struktur industri secara alami, yakni ke arah yang sesuai dengan permintaan pasar yang bebas dari intervensi pemerintah. Restrukturisasi alam yang terjadi adalah terjadinya aku- mulasi produksi broiler dan telur pada beberapa kelompok usaha bermodal, sedangkan usaha rakyat terutama yang mandiri telah menutup usahanya. Artinya, produksi total mengalami kenaikan, sedangkan jumlah peternak berkurang, maka skala usaha per peternak akan meningkat. Beberapa kriteria terdapat di lapang yang dapat menjelaskan hal tersebut: (a) peternak mandiri, sebagian besar telah berhenti paling tidak pada daerah sentra produksi yang diteliti; (b) kemit- raan terjadi secara terbatas; dan (c) pengem- bangan skala besar.

oleh tingkat produksi yang telah mencapai lebih tinggi dibandingkan sebelum wabah AI meledak. Dari sisi konsumsi, hanya sebagian kecil masya- rakat yang masih kuatir mengkonsumsi daging ayam ras, karena pengaruh berita-berita TV dan surat kabar tentang penularan AI pada manusia.

### Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program

Bahan diskusi berikut sebagian besar disarikan dari Usulan Renstra Peternakan 2005-2009 (Yusdja *et al.*, 2005). Dua lingkungan stra- tegis, yang patut mendapat perhatian dalam kerangka perkembangan industri agribisnis ternak dalam negeri, adalah perubahan globalisasi dan permintaan pangan hasil ternak dalam negeri. Perubahan-perubahan tersebut dapat memberikan keuntungan, atau sebaliknya, akan sangat tergantung bagaimana sikap yang diambil oleh Indonesia. Untuk pengembangan industri agribisnis yang sangat tergantung pada impor,



Sumber: Statistik Peternakan 2006

Gambar 10. Perkembangan Populasi Broiler di Jawa, Sumatera dan Kalimantan Setelah Krisis Ekonomi dan Flu Burung, 1999-2005

Tahun 2006 dapat dikatakan bahwa industri ayam ras telah pulih dari pengaruh negatif wabah AI (Gambar 10). Sekalipun wabah AI masih muncul di beberapa tempat dan terus menerus, namun sebagian besar terjadi pada peternakan sektor 4, sedangkan pada sektor 3 hampir tidak ada lagi. Pemulihan itu diperlihatkan

maka dampak perubahan globalisasi ekonomi sangat nyata, tetapi mungkin tidak berpengaruh nyata pada industri peternakan yang sebagian besar menggunakan input dalam negeri.

Sebelumnya perlu ada pemahaman bahwa sebagian besar jenis ternak dan berbagai hasilnya merupakan komoditas dunia, baik nega-

ra maju maupun negara berkembang. Pasar dunia ternak dan hasil ternak diisi oleh banyak negara. Indonesia adalah salah satu negara dalam percaturan dunia sebagai negara konsumen, karena sebagai produsen hasil ternak peran Indonesia relatif kecil. Dalam pasar global, Indonesia adalah negara yang sangat membutuhkan input teknologi peternakan untuk menggerakkan proses produksi dalam negeri, dan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri.

Industri peternakan yang mempunyai ketergantungan tinggi pada bahan baku dan teknologi impor membawa berbagai ancaman dalam negeri. Seperti yang dialami dalam masa krisis moneter, yang telah memporakporandakan industri ayam ras dan sapi potong. Ancaman lain bisa datang dari negara eksportir teknologi tersebut, khususnya, jika mereka mendapat gangguan dalam negeri atau hubungan bilateral. Dalam hal ini, setiap saat negara tersebut dapat menghentikan ekspor teknologi. Seperti kasus wabah AI, setiap negara yang terkena epidemi akan menghentikan ekspor bibit *Grand Parent Stock* (GPS) unggas ke Indonesia, maka dalam masa satu tahun industri ayam ras dalam negeri akan bangkrut. Atau, jika Australia mendapat masalah cuaca, sehingga mereka terpaksa menghentikan ekspor sapi bakalan ke Indonesia, maka dalam 3 tahun akan terjadi kepunahan ternak sapi lokal. Demikian juga dengan ancaman kesulitan impor susu, dapat memberikan dampak kelaparan pada jutaan bayi. Ketergantungan pada impor, jika tidak ditunjang oleh usaha-usaha membangun kemandirian, akan mendorong ketergantungan semakin mendalam dan sulit dipecahkan.

Pembangunan peternakan tentu harus disertai berbagai usaha konkrit untuk mengurangi impor. Pengurangan impor secara bertahap dapat dimulai dari beberapa produk impor yang dapat dihasilkan sendiri dan dalam waktu relatif singkat misalnya 2-3 tahun. Item impor yang diperkirakan dapat dihasilkan sendiri adalah impor sapi bakalan, impor kulit, impor daging dan jeroan, serta impor bahan baku pakan, karena segera dapat diisi oleh produk dalam negeri. Diperlukan berbagai program terobosan jangka menengah menghadapi penurunan impor tersebut dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, seperti plasma nutfah, persediaan pakan hijauan makan ternak (HMT) yang berlimpah se-

panjang tahun, teknologi budidaya, dan keunggulan wilayah sebagai daerah bebas penyakit.

Pada sisi ekspor, Indonesia mempunyai peluang besar mengisi pasar ternak hidup, daging, telur, dan susu. Indonesia dianggap sebagai negara produsen yang aman, karena produk ternak yang masih murni alami, serta bebas penyakit mulut dan kuku. Sampai saat ini ekspor hasil perternakan Indonesia relatif kecil dibandingkan nilai impor, tetapi tetap menggembirakan karena ekspor terus mengalami pertumbuhan 17%/th. Posisi Indonesia sebagai eksportir ternak sebenarnya sangat diharapkan oleh negara-negara Islam dunia. Mereka membutuhkan 5 juta ekor kambing setiap tahun, dan berharap Indonesia dapat mengisi sebagian kebutuhan tersebut. Jika Indonesia mampu mengisi 5% saja dari kebutuhan tersebut, atau sekitar 250 ribu ekor, merupakan permulaan yang baik. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara Islam perlu dikembangkan terutama dalam hal pengadaan dan pemotongan ternak untuk kebutuhan ibadah haji. Pengadaan dan pemotongan ternak dapat dilakukan di Indonesia, sehingga mengurangi beban negara Arab Saudi dalam membagikan daging korban yang melimpah.

Peluang ekspor daging ke Malaysia dan Brunei Darussalam sangat besar, karena masyarakat negeri ini sangat menggemari daging sapi bali dibandingkan daging sapi hibrid. Betapapun kecilnya permintaan kedua negara tersebut, Indonesia harus berusaha memenuhinya, sebagai satu langkah menuju langkah besar dalam meningkatkan daya saing agribisnis ternak. Sementara itu, ekspor ayam ras terlihat terus berkembang sehingga memperlihatkan peluang lain yang harus diraih. Peluang ekspor lain, adalah pakan HMT yang berlimpah dalam negeri untuk tujuan Australia. Australia pernah menjajaki kemungkinan impor HMT dari Indonesia, terutama pada musim kemarau panjang yang melanda negara itu, namun Indonesia belum bisa merespon peluang tersebut. Padahal, Indonesia adalah negara pengimpor sapi bakalan terbesar dari Australia, sehingga mempunyai insentif besar untuk mendapatkan peluang kerja sama dengan Australia.

### **Masalah Umum Pembangunan Peternakan**

Struktur industri peternakan untuk semua komoditas ternak domestik sebagian besar (60-80%) tetap bertahan dalam bentuk usaha rakyat.

Usaha rakyat mempunyai ciri-ciri, antara lain tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar luas, skala usaha relatif kecil, serta pengadaan input utama yakni HMT yang masih tergantung pada musim, tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan HMT yang terbatas, produksi butir-butiran terbatas, dan sebagian tergantung pada impor.

Faktor penghambat utama bagi perkembangan peternakan rakyat adalah ketersediaan HMT dan butir-butiran. Indonesia memproduksi HMT untuk ruminansia secara berlimpah, dan tersebar diseluruh wilayah, namun sebagian besar terbuang. Pada sisi lain, peternak membutuhkan tenaga kerja untuk mencari HMT. Pengadaan input yang tidak efektif seperti itu dilakukan oleh jutaan peternak. Jika tidak ada lembaga jasa penyedia HMT, maka kesulitan tenaga kerja akan menjadi pembatas pengembangan ternak dan skala usaha untuk ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kambing di tingkat peternak. Mereka tidak mempunyai modal untuk membayar tenaga upahan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan skala usaha melebihi kemampuan ketersediaan tenaga kerja justru membuat usaha menjadi tidak efisien.

Atas dasar itu, ketersediaan lembaga pelayanan pengadaan HMT oleh pihak ketiga akan mendorong peningkatan skala usaha dari minimal 3 ekor menjadi maksimal 30 ekor. Peningkatan ini pada akhirnya meningkatkan produksi peternakan dan akan terjadi peningkatan produksi lebih dari 200%. Pelayanan pengadaan pakan dapat disamakan dengan pengadaan air irigasi untuk tanaman pangan. Selama ini, ketiadaan pelayanan HMT oleh pihak ketiga, khususnya oleh pemerintah, telah terbukti tidak mendorong perkembangan industri peternakan. Usaha tradisional tetap tradisional dan tidak ada kemajuan dalam usaha pembibitan. Jika pelayanan itu tersedia, maka diharapkan dari 2 juta peternak rakyat, 10% dapat bangkit menjadi pengusaha-pengusaha skala menengah, 2% menjadi usaha skala besar, dan sisanya adalah usaha rakyat dengan skala usaha lebih dari 10 ekor per RT. Pengembangan peternakan yang berdayasaing haruslah dimulai dari sini.

Faktor penghambat kedua adalah teknologi bibit. Hampir semua jenis ternak domestik tidak mendapat sentuhan teknologi pembibitan yang intensif. Mutu ternak semakin buruk karena

ternak yang baik selalu terpilih untuk dipotong. Berbagai penelitian skala kecil tentang pembibitan telah banyak dilakukan, tetapi belum dapat disosialisasikan dalam skala besar. Dalam hal ini, komunikasi antara Badan Litbang Pertanian maupun Peguruanan Tinggi dengan para perumus kebijakan di Direktorat Jenderal Peternakan belum terjalin dengan baik. Hambatan lain, adalah bahwa peternak rakyat tidak mempunyai insentif nyata dalam mengadopsi teknologi baru, apalagi pemanfaatan teknologi baru selalu disertai dengan peningkatan biaya dan perbaikan manajemen. Pada sisi lain, peternak melakukan budidaya dengan untung-untungan dan biaya mendekati nol.

Untuk merespon permasalahan bagaimana kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah sumberdaya ternak domestik. Banyak gagasan berkembang, antara lain mendorong investor skala besar untuk mengambil alih usaha rakyat itu. Namun, pengusaha besar lebih menyukai menggunakan manajemen dan teknologi impor seperti apa yang dilakukan perusahaan *feedlot* sapi potong, perusahaan peternakan ayam modern, perusahaan sapi perah, dan babi. Namun demikian, pemerintah tidak dapat berpaling dari sumberdaya ternak domestik yang bernilai tinggi dan yang sudah terbukti berperan besar dalam perekonomian pedesaan. Untuk jangka menengah, pemerintah diharapkan menjadi satu-satunya investor bagi terciptanya pelayanan bagi pengembangan usaha rakyat. Pemerintah merupakan lembaga yang saat ini layak mengantarkan industri peternakan rakyat pada pintu gerbang siap landas.

Masalah ketiga berkaitan dengan agro-industri peternakan. Kebijakan pembangunan agroindustri peternakan selama ini secara umum tidak terkait ke belakang, yakni pada budidaya peternakan dalam negeri. Sebagai contoh, industri pengolahan susu, sebagian besar menggunakan input dari negara asal; industri peralatan rumah tangga dan aksesoris, mengimpor kulit dari berbagai negara; dan industri perhotelan membutuhkan daging asal impor. Dengan demikian pertumbuhan agroindustri tidak turut mendorong pertumbuhan subsektor peternakan.

Masalah keempat adalah belum tersedianya data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keabsahan informasi yang diberikan, sekalipun instansi yang mempublikasikan data itu mempunyai kredibilitas tinggi. Dampak dari kele-

mahan pengadaan data ini adalah *pertama*, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan spesifik sesuai permasalahan, kebijakan selalu bersifat umum; *kedua*, dampak kebijakan tidak bisa dianalisis, sehingga pengalaman yang diperoleh dari implementasi program tidak dapat dimanfaatkan. Pemerintah sebaiknya mulai melakukan pendataan sensus, survei tentang populasi ternak secara lengkap dan bertahap sesuai kebutuhan, misalnya, dimulai dari wilayah pengembangan strategis, atau dimulai dari suatu wilayah kecil, kemudian berkembang secara bertahap ke wilayah yang lebih luas dan akhirnya secara nasional.

### **Otonomi Daerah dan Manajemen Pembangunan**

Pembangunan Peternakan mencakup pembangunan semua aspek yang dimulai sejak proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Agar pembangunan tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak diperlukan peran pemerintah. Dalam era Otonomi Daerah (Otda) peran tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sejak era Otda banyak Dinas Peternakan lingkup provinsi, kota, dan kabupaten semakin melemah fungsinya. Hal tersebut disebabkan oleh digabungkannya Dinas Peternakan di beberapa kabupaten/kota dan bahkan provinsi dengan Dinas Lingkup Pertanian lainnya. Dengan kondisi yang demikian, maka program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner makin terabaikan. Padahal, di masa depan masalah ini semakin kompleks dan konsumen makin menuntut kualitas pangan yang baik.

Perkembangan RPH/RPA dalam bentuk Badan Usaha Daerah dan Privat yang kecenderungannya berorientasi profit semata, sehingga mengabaikan fungsinya melaksanakan program ASUH. Jika kecenderungan ini tidak diantisipasi akan makin sulit melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit dan mutu produk ternak. Termasuk dalam hal ini adalah jaringan kerja pengawasan dan pengendalian penyakit hewan, serta pengawasan mutu produk ternak yang lintas daerah membutuhkan koordinasi antardaerah. Jika tidak, maka akan sulit menghindari penyebaran penyakit menular antardaerah.

Perdagangan ternak dari daerah produksi ke daerah konsumsi melintasi beberapa wilayah administratif. Kegiatan tersebut membutuh-

kan biaya, baik resmi maupun tidak resmi, sehingga meningkatkan harga jual produk. Di sisi lain, perdagangan yang mengglobal memungkinkan masuknya produk ternak asal impor. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, produk domestik akan kalah bersaing dengan produk impor di daerah konsumen. Akibatnya, produk peternakan disentra produsen akan menurun nilai tambahnya dan pada akhirnya akan mengurangi aktivitas ekonomi peternakan di sentra produksi, sehingga merugikan daerah itu sendiri.

Perijinan impor dan ekspor produk ternak harus mengikuti pedoman nasional. Hal ini dilakukan karena bukan hanya semata berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga penyebaran penyakit. Kebebasan daerah melakukan impor hanya berdasarkan kebutuhan konsumsi, tanpa memperhatikan aspek-aspek karantina, dapat menimbulkan penyakit pada daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Upaya ini juga akan mengganggu kelangsungan usaha domestik di daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Karena jika suatu daerah melakukan impor, kemungkinan akan terjadi perembesan produk impor tersebut ke daerah sekitarnya.

Perdagangan ternak bibit harus berpedoman pada sistem pembibitan nasional. Suatu daerah akan melakukan ekspor bibit dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya, kegiatan tersebut dapat melanggar sistem pembibitan utama yang berkaitan dengan plasma nutfah. Demikian juga impor jenis ternak ras tertentu tanpa terkendali dapat mengganggu kemurnian plasma nutfah yang ada di daerah.

Dari masalah-masalah tersebut, diperlukan penegasan pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pembangunan Peternakan. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah manajemen pembangunan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Manajemen pembangunan dalam era otonomi daerah adalah: formulasi suatu kebijakan kedepan harus melalui proses *bottom up* dan konsultasi publik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, hasil formulasi kebijakan tersebut disosialisasikan ke masyarakat luas dan dijalankan secara konsisten. Perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan haruslah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapang, mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, layak secara teknis, ekonomis dan sosial.

## PROSPEK PETERNAKAN 2007

### PDB, Kesempatan Kerja, dan Konsumsi

PDB Peternakan tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebagai akibat dampak AI ternyata tidak terbukti. AI yang terjadi pada akhir tahun 2003, hanya memberikan dampak psikologis selama periode bulan Januari sampai Juni 2004. Setelah itu, konsumsi kembali bergerak normal. Penyebab kedua adalah wabah flu burung pada ayam ras telah dapat ditanggulangi. Sehingga peristiwa wabah flu burung yang terjadi tahun 2005 dan 2006 sebagian besar hanya ditemukan pada unggas liar, ayam buras, itik, angsa, dan burung liar.

Peningkatan PDB tahun 2006 akan meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga konsumsi hasil peternakan khususnya daging sapi akan meningkat. Meningkatnya impor sapi bakalan akan mendorong peningkatan PDB Peternakan. Dengan demikian, diperkirakan PDB peternakan yang sebagian besar disumbang oleh ayam ras diproyeksikan naik 7,92% dan 8,31%. PDB tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 52 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2000 atau jika dihitung berdasarkan harga yang berlaku sekitar Rp 61,9 triliun.

Keberhasilan pembangunan peternakan tahun 2007 akan ditentukan oleh kebijakan yang

tepat dalam pengaturan impor (termasuk impor ilegal) ternak hidup, daging dan pajak PPN, serta otonomisasi daerah. Situasi yang masih mengancam tahun 2007 adalah wabah AI, sapi gila dan penyakit mulut-kuku. Jika Indonesia berhasil mengendalikan AI tahun 2006, akan memberikan dampak luas pada pandangan positif dunia internasional, dan dampak positif domestik adalah peningkatan pada konsumsi serta pengembangan usaha. Peningkatan anggaran pembangunan peternakan hendaknya dapat diarahkan pada simpul-simpul pembangunan peternakan, sebagai investasi publik, sehingga dapat mendorong investor membuka usaha komersil.

### Harga Hasil Ternak : Karkas, Broiler, dan Broiler Hidup

Peternak menjual produksi ayam broiler kepada pedagang dalam bentuk hidup. Kemudian pedagang menjualnya kepada RPA (Rumah Potong Ayam). RPA memproduksi karkas broiler dan menjualnya ke berbagai pedagang eceran. Pedagang eceran menjual langsung kepada konsumen. Dengan demikian, ada tiga tingkat harga yang patut diamati, yakni harga broiler hidup, harga karkas produsen (RPA), dan harga karkas konsumen. Gambar 10 memperlihatkan perkembangan ketiga tingkat harga tersebut dan harga proyeksi bulanan untuk akhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007. Proyeksi harga kar-



Sumber: Berbagai Sumber al. Laporan Dinas Peternakan Kab. Blitar, Bogor dan Cianjur

Gambar 11. Perkembangan Harga Karkas Broiler, 2003-2006

kas khusus untuk Jabotabek mendapat koreksi lebih sebesar 10%. Harga karkas juga mendapat koreksi sebesar 13% pada bulan menjelang lebaran. Beberapa informasi yang dapat diambil dari Gambar 11 adalah:

1. Harga broiler hidup yang diterima peternak relatif stabil pada tingkat Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per kg, sekalipun harga karkas tingkat konsumen cenderung terus mengalami kenaikan. Perbedaan antara harga broiler hidup dengan karkas konsumen relatif besar yakni sekitar Rp 4.000 sampai Rp 6.000. Keadaan ini membuktikan bahwa posisi peternak relatif lemah, penanggung beban biaya dan risiko usaha yang tinggi, sementara keuntungan terbesar diperoleh RPA dan Pedagang.
2. Harga karkas tingkat konsumen akan terus meningkat sampai bulan November 2007. Proyeksi harga broiler pada bulan Oktober menjelang lebaran mencapai Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per kg. Kemudian menurun pada bulan Desember 2006.

#### **Harga Input Utama: DOC Broiler, DOC Petelur, dan Pakan**

Harga DOC broiler telah diketahui mengikuti harga karkas broiler konsumen, sehingga pola perubahannya menyamai pola perubahan harga karkas broiler tingkat konsumen. Gambar 12 memperlihatkan indeks perkembangan harga DOC broiler dan harga karkas tingkat konsumen. Jelas terlihat perkembangan indeks harga DOC broiler mirip dengan pola perkembangan harga karkas, kecuali pada krisis wabah AI. Sedangkan Gambar 13 memperlihatkan perkembangan harga pakan yang relatif konstan. Sehingga proyeksi harga DOC dapat dikaitkan dengan harga karkas broiler.

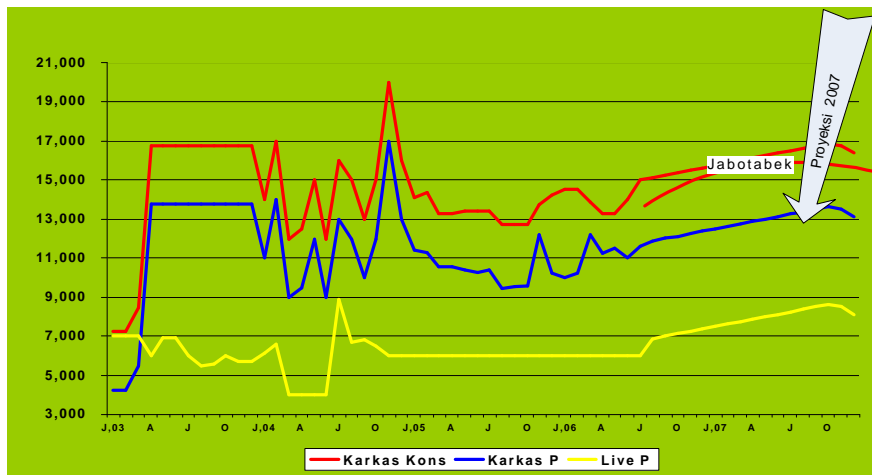
Permintaan DOC petelur sangat menurun pada awal 2006 hingga saat ini. Penurunan permintaan telah menyebabkan stok DOC lebih dibandingkan permintaan, sehingga harga DOC petelur turun drastis sebesar 70%. Sebaliknya harga telur meningkat sekitar 10 sampai 20%. Kenaikan harga telur ini dipicu oleh peningkatan permintaan pada bulan puasa. Sementara itu, penurunan permintaan DOC disebabkan oleh keengganan peternak mengafkir ayam yang tua yang ternyata masih produktif, dan ada perasaan was-was akan muncul kembali wabah AI sebagai akibat dari pemberitaan pers tentang serangan

wabah AI pada manusia. Kejadian penurunan permintaan terjadi mulai awal tahun 2006. Diprediksi harga telur ayam akan mencapai Rp 9.000 sampai Rp 10.000 per kg pada awal tahun 2007, karena sebagian besar ayam petelur diafkir sementara tingkat *replacement stock* sangat rendah.

Sebaliknya, permintaan DOC broiler pada saat ini meningkat sebesar 250% dari harga normal, karena persediaan DOC broiler menurun. Penurunan suplai DOC broiler karena penurunan impor ayam PS dan FS, dan pada sisi lain, karena dampak AI telah terjadi penurunan suplai DOC broiler itu sendiri. Sebagaimana telah dilaporkan di atas bahwa usaha ayam broiler masih gamang terhadap wabah AI dibanding ayam petelur. Selain itu, permintaan DOC selalu meningkat dua bulan sebelum lebaran dan turun lagi sebulan setelah lebaran. Namun, dengan harga yang demikian mahal, tetap saja tidak mudah menemukan DOC di pasar, karena penjualan DOC diutamakan bagi peternak bermitra, sedangkan peternak mandiri dapat dikatakan tidak mendapat jatah. Keadaan ini memaksa usaha peternak mandiri menutup usahanya, walau sementara. Keadaan ini merupakan dampak atau indikasi monopoli atau oligopol dalam perdagangan DOC.

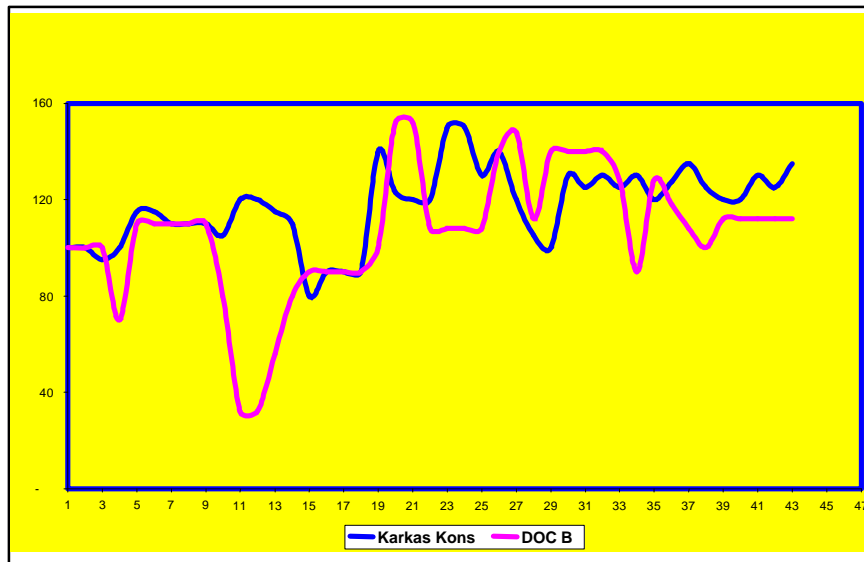
Jika dilihat berdasarkan data impor DOC PS dan FS, maka sejak tahun 2004 Indonesia menghentikan impor. Pada tahun 2002, nilai impor DOC PS adalah US\$ 11.129,8 dengan laju pertumbuhan dari tahun 1998 sebesar 42%/th, mengalami penurunan drastis (Statistik Peternakan, 2005). Sebagai akibatnya, produksi DOC sejak tahun 2006 semakin menurun khususnya ayam broiler. Pada sisi lain, ekspor DOC PS sejak tahun 2004 sudah berhenti karena negara importir tidak lagi mengimpor dari Indonesia sebagai dampak wabah AI. Namun demikian, nilai impor relatif kecil dibandingkan nilai ekspor yakni sekitar 10%.

Dampak wabah AI yang dinilai positif adalah pengembangan produk daging broiler menjadi berbagai produk olahan. Pada saat wabah AI sedang berjangkit dan masyarakat menolak mengkonsumsi daging ayam, maka ribuan ton daging broiler yang tadinya terancam dibuang, diolah oleh industri pengolahan bahan makanan. Sejak tahun 2005, produk olahan asal unggas meningkat karena pasar menerima dengan produk baru ini. Pada saat ini, produk olahan daging unggas seperti nugget, baso, ke-



Sumber: Berbagai Sumber al. Laporan Dinas Peternakan Kab. Blitar, Cianjur dan Bogor

Gambar 12. Perkembangan Indeks Harga DOC dan Harga Karkas Broiler, 2003-2006



Sumber: Berbagai Sumber al. Laporan Dinas Peternakan Kab. Blitar, Cianjur dan Bogor

Gambar 13. Perkembangan Harga Karkas Broiler, DOC dan Pakan, 2003-2006

Rupuk, dan sebagainya memperlihatkan phase baru kemajuan produk olahan, setelah wabah AI.

## PENUTUP

### Kebijakan Perdagangan

#### *Impor Sapi Bakalan*

Kebijakan impor sapi bakalan ternyata telah mulai memberikan dampak negatif bagi produksi dalam negeri. Namun demikian, sisi

positif dari impor sapi bakalan ini adalah pertama mengurangi pengurasan ternak di wilayah WSP dan pada sisi lain kebutuhan daging terpenuhi di WSK sehingga inflasi dapat ditekan. Oleh karena itu, jumlah impor sapi bakalan harus mempertimbangkan tingkat pengurasan dan tingkat kemampuan produksi dalam negeri. Jumlah impor sapi bakalan pada angka lebih dari angka 400 ribu ekor di duga telah dapat mencegah pengurasan di WSP, tetapi jumlah itu telah memberikan dampak terhadap banyak perusahaan perdagangan ternak antarpulau yang terpaksa

harus menutup usahanya. Untuk menjawab berapa jumlah impor yang layak dari tahun ke tahun perlu dilakukan penelitian tentang besaran parameter suplai dan permintaan dalam negeri terutama untuk WSP dan WSK.

### ***Perdagangan Karkas Menggantikan Perdagangan Ternak Hidup***

Pada masa datang perdagangan ternak hidup di dalam negeri mungkin tidak layak lagi. Perdagangan ternak hidup tidak menguntungkan, terlalu banyak pengeluaran retribusi dan pungutan, serta risiko kematian dalam perjalanan. Untuk meningkatkan efisiensi dalam perdagangan ternak, maka layak bagi pemerintah menyediakan RPH yang modern di WSP. Pembangunan RPH modern yang telah dilakukan pemerintah di berbagai provinsi ternyata tidak berjalan. Oleh karena itu, untukantisipasi masa depan, paling tidak RPH modern yang ada di WSP harus kembali dihidupkan untuk tujuan melayani pasar daging khususnya di WSK.

### **Kebijakan Sistem Produksi**

#### ***Kebijakan Tidak Lagi Fokus pada Usaha Rakyat***

Dalam review yang telah disampaikan di atas telah diperlihatkan bahwa industri ayam ras dan usaha pengemukan sapi potong hanya bisa berkembang jika dikelola secara komersil dalam bentuk usaha swasta. Dengan kata lain, pemerintah harus meninggalkan cara-cara lama dalam pengembangan peternakan, seperti strategi dan program yang difokuskan pada usaha peternakan rakyat. Sudah terbukti selama 20 tahun pembangunan peternakan dengan strategi membangun usaha rakyat ternyata tidak berhasil.

Ada dua cara yang saat ini dapat segera dilakukan, yakni pemerintah memfokuskan program-program pembangunan peternakan untuk meningkatkan kemampuan usaha ternak skala kecil (bukan usaha rakyat) yang bersifat komersil hingga skala menengah dengan strategi pendekatan agribisnis seperti yang disarankan Davis and Goldberg (1957). Untuk itu, pemerintah pada tingkat kabupaten diharapkan melakukan pendataan tentang keberadaan usaha pengemukan skala kecil dan skala menengah ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan pembangunan peternakan komersil di wilayahnya masing-masing. Pemerintah sendiri berperan men-

ciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan pelayanan seperti penyediaan pelayanan investasi yang cukup dan memberikan porsi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan peternakan.

Berbagai program yang selama ini diterapkan seperti IB, program bantuan seperti CLS, BLM, Ketahanan Pangan, dan sebagainya, sebaiknya difokuskan pada wilayah sentra produksi, sehingga program-program itu mempunyai skala yang besar, dan diharapkan dapat mempengaruhi secara efektif terhadap populasi dan produktivitas di wilayah produksi. Kebiasaan membagikan program berdasarkan pemerataan di seluruh tempat sebaiknya tidak dilakukan lagi. Program-program diimplementasikan pada wilayah-wilayah yang diunggulkan.

### ***Saran Kebijakan Menyangkut AI***

Perlu dipertimbangkan memberikan sertifikat bebas AI tingkat kabupaten untuk memacu pencapaian Indonesia bebas AI tahun 2009. Pemberian sertifikat bebas AI akan sangat membantu lalu lintas perdagangan peternakan ke arah yang lebih sehat. Pada sisi lain, perusahaan industri hilir dan hulu yang berada pada wilayah tertular akan terdorong untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lebih intensif dalam membebaskan wilayah dari wabah AI.

Restrukturisasi industri perunggasan yang saat ini terjadi secara alami akan mengarah pada pembentukan industri perunggasan skala besar, padat modal, dan terintegrasi. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, apakah harus demikian? Jika pemerintah tetap berpegang pada komitmen peternakan sebagai usaha rakyat, maka sistem kemitraan yang saat ini terjadi harus ditata ulang kembali, sehingga kemitraan menjadi media bersama mencari laba yang adil.

Pada masa mendatang usaha ternak mandiri sektor 3 diprediksi tidak akan ada lagi, sebaliknya bentuk kemitraan dengan perusahaan peternakan (bukan pedangan seperti PS) akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Disarankan supaya pemerintah mengarahkan bentuk kemitraan tersebut ke dalam bentuk terintegrasi dengan inti terutama dalam pelaksanaan bio-sekurity, pelayanan input dan output. Dalam hal ini, peternak mitra haruslah menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses produksi perusahaan inti. Dengan demikian, kemitraan yang saling menguntungkan dapat dicapai.

Pemerintah perlu merancang dan melaksanakan penelitian dampak sosial ekonomi AI di seluruh daerah di Indonesia untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Penelitian ini perlu untuk mendorong restrukturisasi yang rasional, efektif, dan efisien. Pemerintah pusat diharapkan dapat menggerakkan dinas peternakan pada tingkat kabupaten untuk melakukan pendataan usaha peternakan yang lebih rinci. Pada saat ini, Dinas Peternakan hanya fokus pada pelayanan peningkatan populasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 1983. Sensus Pertanian. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 1993. Sensus Pertanian. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- CBS. 2006. Import and Eksport Live Stock From Australia. Central Bureau of Statitik, Austalia. Sydney.
- Davis. J. And R. Goldberg. 1957. A Concept of Agribusiness. Harvard University. Boston. USA.
- Dinas Peternakan Kabupaten Blitas. 2006. Laporan Harga Komoditas Peternakan. Cianjur
- Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur. 2006. Laporan Harga Komoditas Peternakan. Cianjur
- Dinas Peternakan Kabupaten Majalengka. 2006. Laporan Harga Komoditas Peternakan. Cianjur.
- PMDN. 2006. Laporan Perkembangan Investasi. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Jakarta.
- Sensus Peternakan 1993. Seri Peternakan Ayam. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Sensus Peternakan 2003. Seri Peternakan Ayam. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Singh. H and E. N. Moore. 1972. Livestock and Poultry Production. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi.
- Statistik Peternakan. 2006. Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Wodzicka. T., A. Djajanegara., S. Gardiner, T. R. Wiradarya dan I. M. Mastika. 1993. Small Ruminant Production in The Humid Trapics (With special reference to Indonesia). Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Yusdja. Y dan N. Ilham. 2006. Strategi Kebijakan Pembangunan Peternakan. Jurnal AKP (Analisis Kebijakan Pertanian) 4(1). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Yusdja. Y dan N. Ilham. 2007. Gagasan Peternakan Masa Depan. Laporan Teknis. Belum Diterbitkan. Arsip: Jurnal FAE (Forum Agro Ekonomi). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Yusdja. Y, N. Ilham, Sayuti, R., S. Wahyuning., I. Sodokin., Yulia. 2006. Usulan Bahan Untuk Renstra Perternakan. Makalah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
- Yusdja. Y., E. Basuno dan I. W. Rusastra. 2005. Socio-Economic Impact Assesment of Avian Influenza Crisis on Poultry Production, with Particular Focus on Independent Smallholders. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.